



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENYAMPAIAN *SECOND NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS* PADA KTT IKLIM COP29

Teddy Prasetiawan

Analisis Legislatif Ahli Madya
teddy@dpr.go.id

Nadhirah Nurul Saleha Saragih

Analisis Legislatif Ahli Pertama
nadhirah.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia akan menghadiri The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 29th Conference of Parties (KTT Iklim COP29) di Baku, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024 mendatang. Konferensi ini menjadi panggung penting bagi negara-negara di dunia untuk menegaskan komitmen terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan mengusung tema "In Solidarity for A Green World", KTT Iklim COP29 akan diikuti hampir seluruh negara anggota PBB untuk mencari solusi terhadap urgensi iklim. Terdapat dua pilar utama sebagai kerangka aksi pada KTT Iklim COP29, yaitu *enhance ambition* dan *enable action*. Pilar *enhance ambition* bertujuan untuk memperkuat komitmen global dalam mitigasi dan adaptasi, serta meningkatkan transparansi dan kolaborasi antarnegara. Di sisi lain, pilar *enable action* berfokus pada *New Collective Quantified Goal* (NCQG) yang berkaitan dengan pembiayaan iklim, termasuk isu-isu penting dari Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur kerja sama internasional untuk mencapai target iklim, serta pendanaan *loss damage* untuk negara-negara yang terdampak.

Delegasi Indonesia, yang diketuai oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, bertekad untuk membawa suara dan kepentingan nasional ke forum global ini. Berdasarkan mandat Paris Agreement, setiap negara Pihak harus menyampaikan *Second Nationally Determined Contributions* (SNDC) paling lambat bulan Maret 2025. Meski begitu, Indonesia merencanakan untuk menyampaikannya lebih awal. SNDC merupakan komitmen iklim keempat yang dibuat Pemerintah Indonesia sejak 2015. Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan *Intended NDC* (2015) atau *First NDC* (2016), *Updated NDC* (2021) dan *Enhanced NDC* (2022). Hal ini menjadi bagian upaya Indonesia untuk terus meningkatkan komitmennya dalam mengatasi dampak perubahan iklim global.

Berbeda dari NDC sebelumnya, dokumen SNDC akan diselaraskan dengan skenario pembatasan suhu bumi 1,5 derajat Celcius dan membandingkan pengurangan emisi terhadap inventarisasi gas rumah kaca (GRK) tahun 2019 sehingga memberikan rujukan perbandingan antarnegara yang lebih akurat. Selain itu, SNDC juga mengintegrasikan desain karbon biru (*blue carbon*) yang menambah fokus sektor menjadi kehutanan, energi, limbah, pertanian, industri, dan kelautan.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa dalam KTT Iklim COP29 Indonesia akan melakukan peninjauan dengan beberapa negara potensial untuk kerja sama skema perdagangan karbon. Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon. Hal ini dapat dilihat pada rentang waktu 2018-2020 Indonesia telah berhasil melakukan penurunan emisi mencapai 577 juta ton CO₂ ekuivalen dan pada 2021-2023 mencapai 600 juta ton CO₂ ekuivalen. Menurut Hasyim, dengan pencapaian ini potensi penerimaan negara dari perdagangan karbon dapat mencapai Rp190 triliun.

Hingga saat artikel ditulis, belum ada informasi resmi mengenai besaran target baru yang akan dimuat dalam SNDC. Rilis target tersebut masih perlu menyesuaikan arah kebijakan pemerintahan baru, Presiden Prabowo Subianto. Banyak kalangan yang menilai bahwa draf awal SNDC yang sempat diuji publik perlu lebih ambisius dalam menetapkan target. Terlepas dari besaran target SNDC yang akan disampaikan pemerintah pada KTT Iklim COP29, penting untuk memastikan bahwa target-target tersebut dapat dicapai dengan realistis tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional yang lebih besar. Pemerintah harus dapat menjelaskan kepada publik bagaimana target tersebut dicapai sesuai dengan prinsip kerangka transparansi yang kuat (*enhanced transparency framework*) sebagai salah satu media untuk mengontrol pertanggungjawaban setiap negara dalam implementasi komitmen sebagaimana diamanatkan oleh Paris Agreement.

Atensi DPR

Pemerintah Indonesia akan meningkatkan target pengurangan emisi GRK melalui dokumen SNDC yang akan disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada KTT Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024 mendatang. DPR RI perlu mengambil peran penting dalam mengawal komitmen perubahan iklim Indonesia tersebut agar mencapai target pada 2035 mendatang. Komisi XII DPR RI yang membidangi lingkungan hidup dan perubahan iklim harus memastikan program kerja pemerintah sejalan dengan target penurunan emisi GRK. DPR RI juga perlu melakukan pengawasan lintas komisi terhadap pengelolaan perubahan iklim, mengingat target penurunan emisi GRK juga terkait dengan bidang di komisi lain, seperti kehutanan, pertanian, dan kelautan di Komisi IV dan transportasi di Komisi V DPR RI. Untuk itu, DPR RI dapat membentuk panitia khusus atau tim pengawas terkait perubahan iklim. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim tidak hanya menjadi wacana tetapi dapat diimplementasikan secara nyata.

Sumber

antaranews.com, 20 dan 29 Oktober 2024;
kompas.id, 30 Oktober 2024;
menlhk.go.id, 30 Oktober 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

